

Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang

JAKARTA (IM) - Markas Komando Armada I (Koarmada I) resmi pindah dari Jakarta ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (5/12). Pemandangan Koarmada I bertepatan dengan perayaan Hari Armada yang jatuh setiap tanggal 5 Desember.

"Padi Hari Armada tahun ini merupakan Hari Armada yang spesial karena bersamaan dengan peresmian dislokasi Koarmada I beserta jajarannya yang baru (di Tanjungpinang)," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono di Markas Koarmada Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/12) siang.

Pemindahan Koarmada mengakibatkan beberapa satuan di bawah Koarmada I juga mengalami pemindahan markas.

Satuan tersebut terdiri dari Gugus Keamanan Laut I (Guskamla I) yang sebelumnya bermarkas di Batam kini dipindah ke Sabang, Aceh.

Selanjutnya, Gugus Tem-

pur Laut I (Guspurla I) yang sebelumnya bermarkas di Jakarta kini bermigrasi ke Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Lalu Pangkalan Utama Angkatan Laut IV (Lantamal IV), dari Tanjungpinang digeser ke Batam. Sedangkan, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam dipindah ke Tanjung Uban, Kepulauan Riau.

Yudo menjelaskan, pemindahan ini untuk memudahkan komando dan kendali (kodal) dalam memberikan dukungan logistik di daerah operasi, terutama di titik kerawanan strategis di wilayah kerja Koarmada I.

Adapun titik kerawanan strategis tersebut mencakup Natuna, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Sabang.

"Karena itu memang *check point* maupun pintu keluar masuknya kapal-kapal dan juga di sana kerawanan strategisnya sangat tinggi sehingga kita geser ke sana, nanti kapal-kapal secara bertahap juga akan kita geser di Pangkalan Tanjung Uban," ujarnya. ● han

Hakim Tolak Eksepsi Nikita Mirzani soal Pencemaran Nama Baik Dito

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang menolak seluruh nota keberatan yang diajukan Nikita Mirzani. Dengan demikian, siding kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra lanjut ke pembuktian.

Sebelumnya dalam nota keberatan Nikita Mirzani menolak tiga pasal berlipis dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni pertama Pasal 36 jo Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 51 ayat (2), atau kedua Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang ITE, atau ketiga Pasal 311 KUHP.

"Untuk mengadili kami menyatakan nota pembealaan atau eksepsi dari terdakwa Nikita Mirzani tidak diterima," kata majelis hakim di ruang sidang di Pengadilan Negeri Serang, Senin (5/12).

Majelis hakim memerintahkan kepada JPU untuk kembali melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi. Dircanakan bakal digelar pada Senin 12 Desember mendatang dengan agenda

pemeriksaan saksi dari pihak Dito Mahendra.

Sementara itu dalam isi eksepsi Nikita Mirzani di antaranya, pertama sang artis meminta agar JPU membatalkan dakwaan jaksa terhadapnya.

"Satu, menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM1981/SRG/10/2022 Tanggal 04 November 2022 Batal Demi Hukum Atau Menyatakan Tidak Dapat Diterima dan Dinyatakan Tidak Sah," kata Nikita Mirzani saat membacakan nota keberatannya dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Serang, Banten, beberapa waktu lalu.

Nikita meminta kepada JPU untuk mengeluarkannya dari Rumah Tahanan Kelas IIB Serang, Banten.

"Dua, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Nikita Mirzani dari Rumah Tahanan Kelas II B Kota Serang," tandas Nikita Mirzani. ● me

FOTO: ANT



SIDANG LANJUTAN PEMBUNUHAN BRIGADIR J Terdakwa pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ricky Rizal alias RR, memberi kesaksian dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (5/12). Ricky Rizal memberi kesaksian untuk dua terdakwa Richard Eliezer dan Kuat Maruf.

KBRI Kuwait Terbitkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun untuk WNI

JAKARTA (IM) - KBRI Kuwait City mulai menerbitkan paspor bagi warga negara Indonesia (WNI) dengan masa berlaku 10 tahun. Penerbitan paspor ini berlaku sejak 4 Desember 2022.

Hal ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis paspor baru dari Duta Besar Lena Maryana kepada salah satu pekerja migran Indonesia (PMI), Eko Priyanto.

"Peluncuran paspor dengan masa berlaku 10 tahun di KBRI Kuwait City merupakan bentuk dukungan kami atas program pemerintah untuk memberikan kemudahan fasilitas bagi WNI di mana pun berada," ujar Lena

Maryana dalam siaran pers, Senin (5/12).

Lena menyampaikan, tim Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen Imigrasi secara khusus mengirim tim ke Kuwait untuk memperbarui sistem penerbitan paspor. Adapun persyaratan untuk memperoleh paspor baru dengan masa berlaku 10 tahun itu masih sama dengan persyaratan sebelumnya. Biaya yang dikeluarkan juga sama.

"Meskipun masa berlaku paspor berubah dari 5 (tahun) menjadi 10 tahun, memang biaya dan persyaratan penggantian atau penerbitan paspor baru tidak berubah," ucap Lena.

Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Kuwait Yulad Abid Takhasuna mengatakan, biaya yang dikeluarkan sebesar 7,5 dolar Kuwait. "Biaya penggantian atau penerbitan paspor baru tetap sama dengan sebelumnya yaitu 7,5 Kuwait dolar, persyaratan juga masih sama," ujar Yulad.

Nantinya, dari Kuwait, tim Imigrasi akan melanjutkan pembaruan sistem keimigrasian di KBRI Muscat, Oman. ● me

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KSAL HADIRI HARI ARMADA RI

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) bersama istrinya Veronica Yulis Prihayati (kanan) memberikan sambutan pada Hari Armada RI di Lapangan Arafuru Markas Koarmada RI di Jakarta, Senin (5/12). Hari Armada RI tersebut digelar untuk pertama kalinya sejak diresmikan sebagai satuan baru dengan mengangkat tema Komando RI, Pengawal Samudra Untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

Jokowi Pastikan Relokasi Rumah Warga Terdampak Gempa Cianjur Sudah Dimulai

Presiden Jokowi mengatakan, uang ganti rugi rumah korban terdampak gempa Cianjur akan diberikan pada Kamis (8/12).

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pastikan, Senin (5/12), relokasi rumah korban terdampak gempa Cianjur sudah dimulai. Hal tersebut disampaikan Presiden saat kembali mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

"Oleh sebab itu pagi hari ini saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama yang relokasi hari ini dimulai, pembangunannya hari ini relokasi dimulai pembangunannya," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/12).

Kepala Negara memastikan, pemilihan kawasan relokasi bagi warga tersebut sudah

melalui kajian dari instansi yang berwenang di bidangnya. Dengan demikian lokasi tersebut dipastikan lebih aman bagi warga.

"Itu sudah lewat kajian dari BMKG dan dari instansi yang terkait, Badan Meteorologi sudah semuanya," katanya.

Sementara itu, pemberian ganti rugi rumah korban terdampak gempa Cianjur akan diberikan pada Kamis (8/12).

"Kemudian yang kedua nanti hari Kamis ini baru persiapan termasuk verifikasi semuanya selesai. Nanti hari Kamis untuk bantuan yang bukan relokasi, yang bantuan Rp50 juta, Rp25 juta dan Rp10 juta juga akan diberikan hari Kamis mulai diberikan,"

katanya.

Dengan diberikannya bantuan tersebut, Jokowi berharap masyarakat dapat langsung beraktivitas membangun rumahnya ataupun membantu rumah tetangganya. Sehingga diharapkan kegiatan ekonomi kembali pulih.

"Sehingga masyarakat mulai ikut beraktivitas membangun rumahnya, membantu membangun rumahnya kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi bakal memberikan bantuan untuk warga yang rumahnya terdampak akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dirinya menjelaskan nantinya penggantian dilihat dari seberapa besar kerusakan rumah warga.

"Untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak se-

dang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan

bantuan 25 juta dan yang ringan diberikan 10 juta," kata Jokowi dalam keterangannya, Selasa (22/11). ● han

Kasus Suap Rektor Unila, KPK Gali Keterangan Dosen

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa dosen Universitas Lampung (Unila), Riza Satria Perdana, Senin (5/12). Penyidik KPK menggali informasi dari Riza Satria terkait dugaan suap yang menjerat Rektor nonaktif Unila, Karomani (KRM).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setia-budi, Jakarta Selatan, atas nama Riza Satria Perdana, Dosen," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (5/12).

Belum diketahui apa yang bakal dialami penyidik dari keterangan Riza Satria Perdana. Namun, KPK belakangan ini sedang mengembangkan kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Unila.

Dalam perkara ini, KPK menduga banyak pihak yang "menitipkan" calon mahasiswa baru ke Karomani. KPK membuka peluang untuk menjerat pihak lain dalam kasus ini jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa

baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022. Keempat tersangka tersebut adalah Rektor nonaktif Unila, Karomani (KRM).

Kemudian, Wakil Rektor (Warek) 1 Bidang Akademik Unila, Heryandi (HY); Ketua Senat Unila, M Basri (MB); serta pihak swasta, Andi Desfiandi (AD). Karomani, Heryandi, dan Basri, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Andi Desfiandi, tersangka pemberi suap.

Andi Desfiandi saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Lampung. Sementara Karomani dan dua tersangka lainnya, masih dalam proses penyidikan di KPK. Sebab, KPK masih mengembangkan perkara Karomani.

Dalam perkara ini, Karomani diduga mematok atau memasang tarif Rp100 juta hingga Rp350 juta bagi para orang tua yang menginginkan anaknya masuk di Unila. Karomani diduga telah berhasil mengumpulkan Rp5 miliar dari tarif yang ditentukan tersebut. Uang dugaan suap itu diterima Karomani melalui sejumlah pihak perantara, di antaranya Heryandi dan M Basri. Salah satu pihak swasta yang menyuar Karomani adalah Andi Desfiandi. ● han

Oknum Paspampres Diduga Perkosa Prajurit Wanita Kostrad Dijerat Pasal 285 KUHP

Jakarta Pusat.

"Oknum sudah jadi tersangka dan ditahan di Pomdam Jaya," ujar Kisdiantyo.

BF ditahan di Pomdam Jaya sejak Sabtu (3/11) hingga 20 hari ke depan.

"20 hari," ucapnya.

BF diduga memperkosa Letda Caj (K) GER di Bali pada pertengahan November 2022. Peristiwa itu dilaporkan terjadi di sebuah hotel saat keduanya tengah melaksanakan tugas pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan kasus itu ditangani oleh Pusat Polisi Militer (Puspom TNI). Dia mengatakan anggota Puspom TNI sudah memeriksa dan menahan BF yang diduga memperkosa Letda GER. "Oh sudah, sudah proses hukum langsung," kata Andika kepada wartawan usai melepas Satgas Maritime Task Force TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Markas Kolinlami, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/12) lalu.

Andika juga menyatakan BF bakal dipecat karena perbuatannya memperkosa Letda GER. Menurut Andika perbuatan Mayor Infanteri BF juga telah memenuhi unsur pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kalau satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus," kata Andika. ● me

Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijakan Andika soal Penegakan Hukum dan HAM

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono berjanji akan meneruskan kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal Papua. Kebijakan tersebut meliputi penegakan hak asasi (HAM) dan hukum di Bumi Cendrawasih.

"Ya kita tetap menegakkan HAM, menegakkan hukum itu pasti akan kita lanjut yang sekarang dilaksanakan oleh Pak Andika Perkasa tentang itu akan saya lanjutkan," kata Yudo kepada wartawan di Markas Komando Armada Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/12) siang.

Yudo menjelaskan komitmennya soal penegakan HAM dan hukum sudah ia sampaikan pada saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR RI, Jumat (2/12). Untuk itu, ia memastikan akan menjunjung tinggi HAM apabila jabatan Panglima TNI resmi diembannya.

"Kemarin kan waktu *fit and proper test* kan juga sudah ditanyakan dan didalami. Tentunya kita tetap menjunjung tinggi HAM di dalam reformasi birokrasi di dalam prioritas saya yang keempat," katanya.

Meski demikian, Yudo mengatakan, tak semua kebijakan Andika akan diteruskan. Menurut Yudo, kebijakan Andika yang bagus akan diteruskan. Sedangkan, beberapa kebijakan lainnya akan dievaluasi bersama tiga kepala staf angkatan.

"Tentunya tadi yang kemarin saya sampaikan, yang bagus dan masih relevan di zamannya tentunya akan saya lanjutkan. Nah yang lainnya nanti akan kita evaluasi bersama kepala staf yang lain," kata Yudo.

Seperti diketahui bahwa Komisi I DPR menyetujui Yudo menjadi calon Panglima TNI menggantikan Andika yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Peretujuan itu diputuskan usai Komisi I DPR setelah

menggelar *fit and proper test* Yudo sebagai calon Panglima TNI.

"Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi Komisi I, maka Komisi I DPR putuskan setuju pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/12).

"Poin kedua memberikan persetujuan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI," katanya menambahkan.

Yudo merupakan calon tunggal Panglima TNI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Saat menjalani *fit and proper test*, Yudo didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dandung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. ● han

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, Direksi PT Tunas Jaya Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan konversi piutang pemegang saham kepada Perseroan menjadi modal Perseroan.

Jakarta, 6 Desember 2022
Direksi Perseroan



JURNALIS TOLAK PASAL BERMASALAH DI RKUHP Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung membentangkan tulisan dalam aksi tolak 17 pasal bermasalah pada RKUHP di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/12). AJI Bandung menuntut DPR dan pemerintah untuk mencabut 17 pasal bermasalah dalam RKUHP yang dinilai berpotensi mengekang kerja jurnalistik dan mengkriminalisasi jurnalis.